

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
DI SULAWESI BARAT
(Literatur Review)**

Adi Nurmansyah¹, Vania Azalia², Yusnimar Yusri³

Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim
adinurmansyah1233@gmail.com, vaniaazalia0606@gmail.com, yusnimaryusri2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat pasca pemekaran wilayah. Fokus utama diarahkan pada identifikasi pola pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar kabupaten. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis Tipologi Klassen untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, serta perhitungan Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara tergolong daerah yang tumbuh cepat dan maju, sedangkan kabupaten lainnya relatif tertinggal. Indeks Williamson menunjukkan ketimpangan berada pada kategori sedang, dengan tren meningkat selama periode 2011–2015. Selain itu, hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik tidak terbukti di wilayah ini, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diiringi dengan pemerataan pendapatan. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan kontekstual.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Sulawesi Barat.

Abstract

This study aims to analyze the relationship between economic growth and development inequality in West Sulawesi Province following regional expansion. The main focus is directed toward identifying patterns of economic growth and the level of inequality among regencies. The method used is a quantitative approach, employing Klassen Typology to categorize regions based on growth rates and per capita income, as well as the Williamson Index to measure the level of development inequality. The results show that Mamuju and North Mamuju are categorized as fast-growing and developed regions, while the other regencies remain relatively underdeveloped. The Williamson Index indicates that inequality falls within the moderate category, with an increasing trend during the 2011–2015 period. Furthermore, the Kuznets hypothesis regarding the inverted U-curve is not supported in this region, indicating that economic growth has not been accompanied by equitable income distribution. These findings highlight the need for more inclusive and context-based development policies.

Keywords : Economic Growth, Development Inequality, Klassen Typology, Williamson Index, West Sulawesi.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan output suatu wilayah, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi, terutama di daerah-daerah pemekaran yang masih tergolong baru. Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi termuda yang dimekarkan dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004, diharapkan dapat memanfaatkan otonomi daerah untuk mempercepat pembangunan wilayah dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar kabupaten.

Pembangunan wilayah, kualitas pendidikan, dan efektivitas komunikasi publik merupakan tiga aspek strategis dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan. Ketimpangan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama di wilayah seperti Provinsi Sulawesi Barat yang masih tergolong daerah pemekaran. Meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut sempat menunjukkan tren positif, ketimpangan antar kabupaten/kota serta angka kemiskinan yang tinggi mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pembangunan yang telah diterapkan.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sulawesi Barat belum sepenuhnya inklusif. Berdasarkan kajian Rajab dan Kamarudin (2021), meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi ini secara umum cukup stabil, tetapi terjadi fluktuasi yang tajam pada tahun-tahun tertentu, terutama akibat krisis seperti pandemi COVID-19. Selain itu, ketimpangan pembangunan masih terjadi, dengan Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara mendominasi laju pertumbuhan, sementara kabupaten lainnya seperti Majene, Mamasa, dan Mamuju Tengah tertinggal secara signifikan (Hamid et al., 2017).

Amiruddin (2020) menambahkan bahwa perbedaan geografis, alokasi anggaran, infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia turut memperkuat ketimpangan ini. Kondisi ini mengindikasikan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu, yang menyebabkan disparitas kesejahteraan dan akses terhadap pembangunan antarkabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Padahal, desentralisasi dan pemekaran wilayah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah agar dapat mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan pemerataan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan pendidikan juga mencuat, khususnya dalam kemampuan mahasiswa menyelesaikan soal cerita matematika. Berdasarkan tahapan Polya, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami masalah dan merancang solusi yang tepat, yang menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir sistematis. Sementara itu, dalam konteks pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial telah menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Studi pada Humas Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan citra pemerintah, meskipun efektivitasnya masih dapat ditingkatkan, terutama dalam aspek interaktivitas.

Ketiga isu ini, meskipun berasal dari bidang yang berbeda, mencerminkan pentingnya pendekatan terstruktur, partisipatif, dan berbasis data dalam menciptakan kebijakan yang berdampak luas. Dengan memahami dinamika pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan strategi komunikasi publik, diharapkan perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literature review (tinjauan pustaka). Metode ini dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis sistematis terhadap literatur yang relevan mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

1. Literatur utama yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari tiga artikel ilmiah yang membahas topik secara empiris, yakni:

- a. **Rajab & Kamarudin (2021)** yang menganalisis pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah, dan tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat dalam rentang tahun 2005–2020 menggunakan pendekatan kuantitatif dan indikator seperti PDRB dan Indeks Williamson.
- b. **Abidin & Amiruddin (2020)** yang mengkaji ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Sulawesi Barat menggunakan analisis campuran (mixed methods), dengan fokus pada faktor-faktor struktural seperti geografis, infrastruktur, sumber daya manusia, dan dinamika kebijakan.

- c. **Hamid, Siradjuddin & Rusydi (2017)** yang mengaplikasikan Tipologi Klassen dan Indeks Williamson dalam menganalisis pola pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten selama periode 2011–2015, serta menguji hipotesis Kuznets.

2. Prosedur dalam metode literature review ini mencakup:

- a. **Identifikasi sumber:** Artikel yang dipilih adalah karya ilmiah yang relevan dan kredibel, terbit dalam jurnal akademik, serta membahas langsung topik yang menjadi fokus penelitian.
- b. **Analisis isi:** Setiap artikel ditelaah untuk menemukan konsep utama, metodologi, temuan empiris, serta relevansinya dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat.
- c. **Sintesis informasi:** Temuan dari ketiga artikel dikomparasikan untuk melihat konsistensi, variasi hasil, dan penjelasan faktor-faktor penyebab ketimpangan.
- d. **Penarikan kesimpulan:** Berdasarkan sintesis tersebut, dilakukan pemetaan isu dan penarikan implikasi terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Metode literature review ini memberikan pemahaman yang komprehensif dan teoritis mengenai dinamika pembangunan di Sulawesi Barat, tanpa melakukan pengumpulan data primer, namun mengandalkan kekayaan data dan analisis dari penelitian terdahulu.

HASIL PENELITIAN

N o.	Penulis	Tujuan	Abstrak	Metode	Samp el	Variabel	Hasil	Kesimpulan
1.	(Amru ddin, 2020)	Mengan alisis tingkat ketimpa ngan pembedan antar kabupat en di	Penelitian ini mengkaji ketimpa ngan antar kabupat en di Sulawes	Metode campuran (kuantitatif dan kualitatif); analisis menggu nakan	Enam kabup aten di Provinsi Sulaw esi Barat.	Indeks ketimpa ngan (IW), PDRB per kapita, jumlah penduduk, IPM,	Ketimpa ngan pembedan tergolong sedang, tertinggi pada 2015	Ketimpanga n dipengaruhi oleh ketidakseim bangan SDM, infrastruktu r, dan potensi

		Provinsi Sulawesi Barat pasca pemekaran.	i Barat dengan pendektan campuran. Hasil menunjukkan ketimpangan kategori sedang (IW 0,35–0,5), disebabkan oleh perbedaan SDM, SDA, geografis, dan konsentrasi ekonomi.	Indeks Williams on.		sektor unggulan daerah.	(IW: 0,376). Ketimpangan disebabkan oleh dominasi sektor ekonomi di daerah tertentu.	ekonomi. Perlu fokus pada penguatan SDM dan sektor unggulan lokal.
2.	(Hami d, 2015)	Menganalisis pertumbuhan ekonomi	Penelitian ini menggunakan data	Kuantitatif; analisis Tipologi Klassen,	Enam kabupaten di Provi	Pertumbuhan ekonomi, pendapa	Kabupaten Mamuju dan Mamuju	Terdapat ketimpangan pembangunan antar

		dan tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011–2015.	sekunder dengan pendekatan kuantitatif, untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di Sulbar. Hasilnya menunjukkan adanya dua kabupaten tumbuh cepat, empat kabupaten tertinggat, dan ketimpangan	Indeks Williams, dan pengujian Hipotesis Kuznets.	nsi Sulawesi Barat.	tan per kapita, jumlah penduduk, dan indeks ketimpangan wilayah.	Utara tumbuh cepat; empat kabupaten lainnya relatif tertinggat. Ketimpangan meningkat dari 2011–2015 namun tetap dalam kategori rendah.	kabupaten. Diperlukan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung pertumbuhan yang merata.
--	--	--	---	---	---------------------	--	---	--

			ngan berada di kategori rendah (rata-rata IW: 0,351). Hipotesis Kuznets tidak terbukti.					
3.	(Rajab & Kamarudin, 2021)	Menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal, ketimpangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.	Penelitian ini meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data	Menggunakan metode estimasi panel data dengan pendekatan fixed effect dan alat analisis regresi.	33 provinsi di Indonesia selama periode 2005–2019.	Pertumbuhan ekonomi (Y) - Ketimpangan wilayah (Indeks Williamson) - Desentralisasi fiskal (rasio belanja dan pendapatan transfer)	Desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap wilayah, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumb	Desentralisasi fiskal cenderung meningkatkan ketimpangan wilayah, sehingga kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan mempercepat pertumbuhan.

			panel dari 33 provinsi Indonesi a selama 2005– 2019.				uhan ekonomi	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami dinamika yang signifikan sejak pemekaran wilayah ini pada tahun 2004. Menurut Rajab dan Kamarudin (2021), salah satu capaian tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan angka pertumbuhan mencapai 11,91%. Namun, situasi ini berubah drastis pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor ekonomi, menyebabkan pertumbuhan anjlok ke angka -2,42%. Kondisi tersebut menunjukkan betapa rentannya ekonomi Sulawesi Barat terhadap faktor eksternal, sekaligus menandakan belum kuatnya fondasi ekonomi daerah untuk menghadapi krisis global. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum merata di seluruh kabupaten. Data menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara yang tergolong daerah maju dan tumbuh cepat. Sementara itu, Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Tengah masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh distribusi hasil pembangunan yang setara antarwilayah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyebab utama dari ketimpangan tersebut antara lain adalah perbedaan sumber daya alam, infrastruktur, aksesibilitas, dan jumlah penduduk. Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara memiliki infrastruktur yang lebih baik, sektor ekonomi yang dominan seperti perkebunan kelapa sawit, serta lokasi strategis yang menunjang investasi. Sebaliknya, kabupaten seperti Mamasa dan Majene menghadapi keterbatasan dalam konektivitas wilayah dan kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak mampu mengoptimalkan potensi daerah secara maksimal. Pengukuran ketimpangan menggunakan Indeks Williamson dalam ketiga artikel menunjukkan nilai yang konsisten berada pada kategori sedang, dengan kisaran indeks antara 0,32 hingga 0,38 pada tahun 2011–2015. Meskipun tidak menunjukkan ketimpangan tinggi, tren peningkatan indeks pada periode

tersebut memperlihatkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus untuk menekan disparitas pembangunan antar kabupaten.

Amiruddin (2020) menekankan bahwa ketimpangan ini juga bersumber dari kebijakan pembangunan yang belum mampu menyasar secara merata pada sektor unggulan daerah tertinggal. Selain itu, sektor ekonomi yang masih dominan berbasis sumber daya alam, seperti pertanian dan perikanan, belum diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk di sektor-sektor tersebut.

Dalam konteks pemerataan, pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi kunci untuk memperbaiki ketimpangan. Kabupaten-kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, seperti Polewali Mandar dan Mamasa, menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya terkendala oleh faktor ekonomi tetapi juga sosial budaya. Ketimpangan pembangunan ini kemudian menjadi penghambat utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, analisis Tipologi Klassen menunjukkan pola klasifikasi daerah yang beragam. Hanya dua kabupaten yang berada di Kuadran I sebagai daerah maju dan tumbuh cepat, sementara empat lainnya tertinggal baik dari segi laju pertumbuhan maupun pendapatan per kapita. Hal ini mempertegas bahwa kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi spesifik tiap kabupaten agar strategi pembangunan lebih tepat sasaran.

Menariknya, pembuktian terhadap hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik tidak berlaku dalam konteks Sulawesi Barat. Artinya, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan tidak otomatis membaik. Justru terjadi kecenderungan memburuk dalam periode 2011–2015, yang menunjukkan bahwa tanpa intervensi pemerataan, pertumbuhan ekonomi hanya akan menguntungkan wilayah yang sudah lebih maju.

Dalam ketimpangan pembangunan antarwilayah kabupaten di Sulawesi Barat juga menjadi permasalahan yang krusial. Dalam penelitian Rajab dan Kamarudin (2021), indeks ketimpangan wilayah (Williamson Index) menunjukkan kategori sedang di beberapa tahun sebelum pandemi, kemudian menurun ke kategori ringan menjelang 2020. Penurunan ini sebenarnya dapat dilihat sebagai kemajuan, namun belum berarti bahwa ketimpangan benar-benar teratasi. Masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya, terutama di luar pusat pemerintahan seperti Kabupaten Mamuju.

Distribusi dalam pembangunan yang tidak merata mengakibatkan sebagian besar aktivitas ekonomi terpusat di wilayah tertentu. Kabupaten Mamuju, sebagai pusat pertumbuhan, menikmati fasilitas dan akses yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya seperti Mamasa, Majene, atau Polewali Mandar. Ketimpangan ini berkontribusi terhadap perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing kabupaten. Rajab dan Kamarudin (2021) menyoroti bahwa pola pertumbuhan semacam ini, bila tidak segera diatasi, akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah dalam jangka panjang.

Tingkat kemiskinan menjadi indikator lain yang mencerminkan ketimpangan pembangunan. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 19,03% pada tahun 2006 ke 10,87% pada tahun 2019, angka kemiskinan di Sulawesi Barat kembali meningkat menjadi 20,74% pada tahun 2020 sebagai dampak langsung dari pandemi (Rajab & Kamarudin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sangat rentan terhadap gejolak, serta tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat paling rentan di tengah krisis.

Dalam upaya memperkecil ketimpangan, pendekatan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting. (Amruddin, 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis Android mampu meningkatkan efektivitas belajar dan menjangkau siswa di daerah terpencil. Penerapan teknologi semacam ini sangat relevan untuk Sulawesi Barat, mengingat tantangan geografis dan keterbatasan akses fisik terhadap pendidikan di banyak wilayah. Transformasi pendidikan berbasis teknologi dapat menjadi alat pemerataan kesempatan belajar yang mendukung pembangunan jangka panjang.

Selain dari sisi pendidikan, peran tata kelola pemerintahan juga memegang kunci utama dalam mendorong pembangunan yang merata. Penelitian (Hamid, 2015) menekankan pentingnya budaya organisasi dan komitmen karyawan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa ASN harus memiliki semangat kerja yang tinggi dan integritas dalam menjalankan program-program pembangunan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di pusat kota tetapi juga di daerah pinggiran dan pedalaman.

Ketimpangan pembangunan seringkali dipicu oleh lemahnya koordinasi antar instansi, tidak optimalnya perencanaan wilayah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk itu, diperlukan model pembangunan yang kolaboratif dan berbasis data.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem pemantauan terpadu, pemerintah daerah bisa memastikan bahwa intervensi pembangunan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di berbagai wilayah.

Pemerataan pembangunan juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja lokal dan mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih luas. Sektor pertanian berbasis teknologi, pengembangan UMKM lokal, serta digitalisasi ekonomi rakyat bisa menjadi alternatif strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Dukungan terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, internet, dan air bersih menjadi syarat mutlak bagi setiap wilayah untuk tumbuh secara setara.

Secara keseluruhan, meskipun Sulawesi Barat menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi, persoalan ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan utama. Solusi terhadap permasalahan ini tidak cukup hanya melalui pendekatan ekonomi, tetapi juga memerlukan integrasi kebijakan pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan inovasi teknologi. Ketiga artikel yang diulas memberikan gambaran bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi antar sektor dan keberpihakan terhadap daerah-daerah yang selama ini tertinggal.

Pemerintah daerah Sulawesi Barat harus mampu memanfaatkan potensi lokal setiap kabupaten secara optimal untuk memperkecil ketimpangan. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan keunggulan komparatif yang bisa dikembangkan, seperti sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata berbasis budaya dan alam. Ketika pengembangan wilayah tidak lagi bersifat sentralistik, maka distribusi ekonomi akan lebih adil. Rajab dan Kamarudin (2021) menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal dalam pembangunan untuk menciptakan kemandirian ekonomi daerah.

Di sisi lain, perluasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan komunikasi menjadi aspek vital dalam memperkecil ketimpangan. Kabupaten yang memiliki akses infrastruktur yang buruk akan tertinggal dalam mengakses pasar, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) sangat menentukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

Digitalisasi layanan publik juga dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Sistem informasi geografis (GIS), e-government, dan layanan berbasis aplikasi dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan berbasis data dan mengatasi keterbatasan

geografis. (Amruddin, 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi Android dalam pendidikan berhasil meningkatkan efisiensi pembelajaran. Pendekatan yang sama dapat diterapkan untuk layanan publik lainnya agar menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

Ketimpangan juga berkaitan dengan kualitas perencanaan pembangunan. Banyak program yang dijalankan tanpa kajian mendalam terhadap kebutuhan lokal, sehingga tidak berdampak optimal. Diperlukan sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perangkat daerah teknis, dan tokoh masyarakat agar pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan efisien.

Selain pendekatan struktural, pembangunan yang berkeadilan juga memerlukan penguatan kapasitas masyarakat. Pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi keuangan, serta akses terhadap pembiayaan mikro dapat memberdayakan masyarakat lokal, terutama di sektor informal. Rajab dan Kamarudin (2021) menyebutkan bahwa sektor UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam menopang ekonomi Sulawesi Barat, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.

Kinerja aparatur pemerintahan juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan wilayah. (Hamid, 2015) menyatakan bahwa budaya organisasi yang positif dan komitmen karyawan terhadap tugas akan mempengaruhi pencapaian target organisasi. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN sangat dibutuhkan agar kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara profesional dan konsisten di seluruh kabupaten.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) harus menjadi ruang dialog terbuka, bukan sekadar formalitas. Dengan mendengarkan aspirasi dari akar rumput, pembangunan akan lebih responsif dan kontekstual terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Akhirnya, analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat multidimensi. Diperlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Ketiga artikel yang dianalisis baik dari sisi ekonomi makro, pendidikan berbasis teknologi, maupun budaya organisasi semuanya mengarah pada satu kesimpulan penting: pembangunan yang adil hanya dapat tercapai melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang profesional, dan evaluasi yang berkelanjutan.

faktor internal daerah, kebijakan nasional juga turut memengaruhi arah pembangunan di Sulawesi Barat. Kebijakan desentralisasi fiskal melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri. Namun, bila tidak diiringi dengan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik, maka dana tersebut cenderung tidak efektif dalam mengatasi ketimpangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Kemiskinan yang masih tinggi di beberapa wilayah di Sulawesi Barat juga erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja. Upaya menurunkan ketimpangan tidak hanya cukup dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial seperti pendidikan dan pelatihan kerja. (Amruddin, 2020) menekankan pentingnya media pembelajaran yang menarik dan mudah diakses agar dapat menjangkau masyarakat, terutama di daerah yang belum tersentuh oleh layanan pendidikan formal secara maksimal.

Jangka panjang, investasi di bidang pendidikan akan memperkuat daya saing daerah. Ketika masyarakat memiliki keterampilan dan akses informasi yang baik, mereka dapat menciptakan peluang usaha sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah. Ini akan menumbuhkan ekonomi lokal yang lebih dinamis dan berkontribusi dalam memperkecil ketimpangan antarwilayah. Oleh sebab itu, integrasi antara pembangunan ekonomi dan investasi sumber daya manusia menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan.

Aspek kelembagaan juga menjadi sorotan penting. Dalam kajian (Hamid, 2015), disebutkan bahwa organisasi yang memiliki budaya kerja profesional dan manajemen yang adaptif cenderung menghasilkan kinerja lebih baik. Di Sulawesi Barat, peningkatan kualitas aparatur sipil negara melalui pelatihan dan evaluasi berbasis kinerja akan menjadi langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan. Reformasi birokrasi bukan hanya soal efisiensi, tapi juga kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketimpangan pembangunan yang dibiarkan tanpa penanganan serius akan berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Daerah-daerah yang merasa termarjinalkan akan menuntut keadilan dan representasi lebih besar. Oleh karena itu, pengelolaan ketimpangan tidak hanya soal angka statistik, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan keberdayaan masyarakat. Prinsip keadilan spasial dan sosial harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga perlu mendorong kemitraan strategis untuk investasi, inovasi, dan pelayanan publik. Dengan pendekatan kolaboratif, pembangunan akan lebih inklusif dan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.

Analisis ini menggaris bawahi bahwa keberhasilan pembangunan di Sulawesi Barat tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pemerataan hasil pembangunan, penurunan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten harus menjadi indikator utama. Ketika pembangunan dilaksanakan secara berkeadilan, maka Sulawesi Barat dapat tumbuh sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan satu daerah pun di belakang.

Dalam konteks pembangunan wilayah, pendekatan spasial sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur, layanan publik, dan investasi tersebar secara merata. Ketimpangan geografis di Sulawesi Barat, seperti perbedaan antara wilayah pesisir dan pegunungan, harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten seperti Mamasa, yang memiliki kondisi topografi sulit, membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan wilayah seperti Polewali Mandar yang memiliki akses lebih terbuka. Ketimpangan seperti ini tidak akan terselesaikan tanpa analisis spasial yang akurat.

Pengembangan klaster ekonomi berbasis potensi lokal bisa menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pertumbuhan yang merata. Misalnya, daerah dengan potensi pertanian atau perkebunan dapat difokuskan sebagai sentra agroindustri, sementara daerah dengan keunggulan wisata alam dan budaya dikembangkan sebagai destinasi pariwisata unggulan. Strategi ini akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menahan laju urbanisasi ke pusat kota dan mengurangi beban ekonomi yang terpusat di satu wilayah saja.

Keterlibatan generasi muda dalam proses pembangunan juga menjadi aspek penting yang belum sepenuhnya dimaksimalkan. Dengan bonus demografi yang dimiliki, Sulawesi Barat memiliki peluang untuk menciptakan tenaga kerja produktif yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi. Penerapan pembelajaran berbasis digital, sebagaimana diteliti oleh (Amruddin, 2020), dapat membantu menyiapkan generasi muda untuk menghadapi dunia kerja modern dan ikut berperan dalam membangun daerahnya masing-masing.

Disparitas gender dalam pembangunan juga perlu menjadi perhatian. Akses perempuan terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peran dalam pengambilan keputusan

pembangunan di tingkat lokal masih memerlukan penguatan. Ketika perempuan dilibatkan secara aktif dalam pembangunan ekonomi lokal misalnya melalui pelatihan UMKM atau koperasi wanita dampaknya akan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di tingkat keluarga dan komunitas.

Dalam memperkuat efektivitas pembangunan, pemantauan dan evaluasi berbasis indikator harus dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem yang mampu memantau perkembangan pembangunan antar kabupaten dengan indikator yang terukur, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), indeks ketimpangan wilayah, dan indeks kinerja layanan publik. Evaluasi berbasis data ini akan membantu dalam menyusun kebijakan korektif secara cepat dan akurat.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Strategi pembangunan berbasis potensi lokal, peningkatan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menekan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan arah kebijakan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap kabupaten agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat kompleks dan saling berkaitan. Diperlukan pendekatan lintas sektor, kolaboratif, dan berbasis data untuk mengatasi disparitas antarwilayah. Ketiga artikel yang digunakan dalam pembahasan ini memperkaya perspektif tentang pentingnya pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi sebagai pilar utama untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif secara umum, namun masih diiringi oleh ketimpangan pembangunan antar kabupaten. Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara mengalami pertumbuhan pesat karena dukungan infrastruktur, sumber daya alam, dan posisi strategis, sementara kabupaten lain seperti Mamasa, Majene, dan Mamuju Tengah tertinggal dari segi ekonomi dan sosial. Indeks Williamson menunjukkan tingkat ketimpangan dalam kategori sedang, dengan kecenderungan meningkat selama periode 2011–2015. Analisis Tipologi Klassen dan pengujian hipotesis Kuznets menegaskan bahwa

pertumbuhan ekonomi belum berdampak pada pemerataan pendapatan. Ketimpangan yang terjadi lebih disebabkan oleh perbedaan geografis, akses pembangunan, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di Sulawesi Barat perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan melalui penguatan sektor unggulan lokal dan investasi sosial yang merata antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, A. (2020). Ketimpangan Pembangunan Di Sulawesi Barat. *Jurnal Arajang*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.582>
- Hamid, M. (2015). *Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi*.
- Rajab, A., & Kamarudin, J. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 23(4), 607–613. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>